**DALIL - DALIL**

1. Kebijakan desentralisasi melalui perizinan terpadu yang efektif mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang optimal.
2. Implementasi kebijakan perizinan terpadu yang efektif sangat ditentukan oleh implementator yang kredibel dan alokasi anggaran yang memadai.
3. Implementasi kebijakan perizinan terpadu yang efektif akan sangat menentukan kualitas pelayanan publik dan peningkatan citra positif pemerintahan.
4. Komitmen kepemimpinan pemerintahan yang demokrasi akan sangat menentukan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Iklim organisasi yang kondusif dapat terwujud dengan menegakkan keadilan dalam manajemen pemerintahan melalui strategi reward and punishment.
6. Kebijakan publik yang dinamis, efektifitasnya akan sangat ditentukan dari kemampuan merespon masalah dan tuntutan persoalan yang ada di masyarakat.
7. Pendidikan yang intensif akan mampu merubah sikap dan prilaku budaya organisasi serta budaya masyarakat.

**ABSTRAK**

Penelitian ini tentang Strategi Implementasi Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sumedang. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang bila dibandingkan dengan besarnya APBD, masih relatif kecil. Pertumbuhan PAD-nya dari tahun 2012 sampai 2013 rata-rata mencapai 7 % per tahun. Pihak BPMPT Kabupaten Sumedang, belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari fenomena masih banyaknya keluhan masyarakat atas belum terpuaskannya penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Sumedang.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus observasi yang merupakan salah satu bagian dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggali data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara atau prilaku informan dan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, jurnal, karya ilmiah dan lain-lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle, meskipun telah dilaksanakan dari aspek konten maupun konteks implementasi kebijakan pada BPMPT Kabupaten Sumedang, tetapi belum optimal, khususnya dalam prilaku budaya kerja. Akibatnya, kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan perizinan terpadu ini masih rendah.

Kata Kunci : Strategi, Implementasi Kebijakan dan Perizinan Yang Optimal.

***ABSTRACT***

*This study of the implementation strategy of licensing the investment and licensing bodies integrated sumedang district. Growth in Local revenue district sumedang when compared to the size of the budget is still relatively small . PAD growth from 2012 to 2013 reached an average of 7 percent annually. Sumedang district BPMPT party has not reached the set target. It can be seen from many phenomena still not satisfying the people’s complaints over the implementation of licensing in Sumedang district.*

*The method used is qualitative case study approach observation is one part in qualitative research. The data collection techniques to collect data derived from primary data and secondary data. Primary data obtained through interviews or behavior informants and secondary data obtained from various documents, journals, scientific papers and others.*

*The results showed that the policy implementation model proposed by grindle though it has been carried out on aspects of the content and context of policy implementation at the district BPMPT Sumedang, especially in the work culture. Consequently people’s satisfaction with the implementation of a unified licensing is still low.*

*Key Words : Strategy, Policy Implementation, and optimal licensing*